

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu permasalahan penting yang perlu dilakukan oleh lembaga pemerintahan, pendukung sosial atau pihak yang bertanggung jawab agar terciptanya peningkatan dan perkembangan mutu hidup masyarakat ke arah yang lebih progresif. Pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi tumpuan pembangunan karena ketidakberdayaan yang terjadi pada masyarakat telah menjadi inti dari sumber permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertopang pada masyarakat (*community-based development*). Pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik, kuat, dan inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang koheren dalam membangun dan meningkatkan kapabilitas masyarakat, agar

¹ Ginandjar Kartasmita “*Pemberdayaan Masyarakat; Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*”, disampaikan pada sarasehan DPD Golkar Tk. 1 Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997. Hal 1

mampu mewujudkan kemandirian untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapabilitas dalam memandirikan masyarakat yang lemah untuk bisa menjadi kuat, serta menjadikan masyarakat yang pasif menjadi aktif dan berani untuk melakukan sesuatu. Maka pemberdayaan masyarakat muncul sebagai bentuk solusi terhadap masyarakat yang lemah, tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi dalam menggali dan membangun potensi mereka. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan selama ini dengan berbagai macam, bentuk dan varian, yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat.

Semakin berpengaruhnya paradigma pembangunan yang arus utamanya dalam struktur dasarnya adalah “perkembangan ekonomi” dan “modernisasi” yang dibangun di atas akar budaya “materialistik”, “konsumtif”, “hedonistik”, “persaingan”, dan “eksploitasi tanpa batas” atau “keserakahan” demi agregasi kapital yang tanpa batas pula.² Maka pemberdaya masyarakat ada, guna mengentaskan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam penyelesaiannya permasalahan perkembangan ekonomi memiliki banyak macam rancangan dan program, salah satunya adalah dengan program kewirausahaan sosial pemuda melalui bisnis angkringan. Perkembangan pada bisnis angkringan semakin luas dikenal oleh masyarakat sehingga tidak heran jika banyak yang mengetahuinya, namun untuk di Jakarta sendiri khususnya di Jakarta Utara hanya terlihat beberapanya saja.

² Agus Afandi, *Participatory Action tesearch (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transfirmatif* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), LP2M, hal.1

Sederhananya, kewirausahaan sosial adalah mengatasi masalah sosial dengan pendekatan bisnis atau kewirausahaan. Artinya, penyelesaian masalah sosial menjadi prioritas utama dalam program bisnis. Bisnis atau kewirausahaan berperan dalam memastikan penyelesaian masalah sosial agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.³

Kewirausahaan sosial menjadi peran sebagai agen perubahan di sektor sosial, dengan cara mengemban misi yang bersifat nilai-nilai seperti mewujudkan dan mempertahankan nilai sosial (dan bukan kepentingan pribadi), mengidentifikasi dan mengejar peluang baru, serta ikut andil dalam proses yang berkelanjutan dengan melibatkan inovasi pembelajaran, dan mengatasi keterbatasan yang disebabkan oleh SDM yang langka atau minim dan mereka mengindikasikan tanggung jawab yang lebih besar untuk hasil dan nilai yang dicapai⁴

Kewirausahaan adalah kapabilitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.⁵ Pada abad ke-20, lahirlah ideologi tentang *entrepreneur* sebagai seorang inovator (orang yang menemukan atau menciptakan hal-hal baru). Seorang *entrepreneur* adalah seorang individu yang menerima resiko, dan yang melaksanakan tindakan-tindakan untuk mengejar peluang-peluang dalam suatu kondisi di mana pihak lain tidak melihat atau merasakannya, bahkan ada kemungkinan pihak lain menganggapnya sebagai sesuatu problem dan bahkan

³ Muhammad Setiawan Kusmulyono, Rudy Handoko, Faizal Ahmad, Florence Juanita Renti, “*Kewirausahaan Sosial Fondasi, Ragam, dan Transformasi*”(Jakarta: Prastiya Mulya Publishing, 2022), hal. 2

⁴ Sawal Satono, Sri Sutrismi “*Kewirausahaan ; Kewirausahaan Komersial dan Sosial (studi Literatur)*” Jurnal Benefit Vol.7 No. 2 (Juni 2020). hal 98 Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung

⁵ Ilham, Heri Cahyo Bagus Setiawan, Nuzulul Fatimah, *Dasar-dasar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Perpustakaan Nasional:TKD. Penerbit, PT BERKAT MUKMIN MANDIRI. Hal, 2.

sebagai suatu ancaman bagi mereka, tapi bagi seorang *entrepreneur* adalah sebuah keuntungan.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dengan proses mengembangkan pelaku usaha (*entrepreneur*) yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan mental dengan harapan dapat mewujudkan kepribadian yang mandiri dalam berbisnis dan berwirausaha.⁶ Kehadiran kewirausahaan sosial sangat dibutuhkan karena masalah sosial makin banyak dan beragam, namun solusi penyelesaiannya banyak yang belum bersifat berkelanjutan. Masyarakat yang berjiwa sosial dan memiliki idealisme sosial memang tidak pernah habis. Akan tetapi, jika orientasinya hanya bersifat mengobati, masalah sosial akan selalu muncul. Maka dari itu, kewirausahaan sosial dibutuhkan untuk mengantisipasi masalah sosial yang akan datang, sebagai suatu pendekatan dalam mengatasi dan menghilangkan masalah sosial yang ada.⁷

Berawal dari permasalahan pemuda yang hidupnya hanya berkumpul yang kurang bermanfaat baik dirinya maupun orang lain, pandangan seperti itu tentunya menjadi pemandangan yang tidak sedap dan hampir setiap malam tampak di Kampung Bidara Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertikaian antar kelompok (tawuran) dan hal-hal negatif lainnya, kondisi ini menggugah penulis untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pemuda. Dalam hal ini penulis

⁶ Didip Diandra, "*PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAN UNTUK MENCIPTAKAN PELAKU USAH SOSIAL YANG KOMPETITIF*", Jurnal Polban, Vol 10, NO 1, (2019)

⁷ Muhammad Setiawan Kusmulyono, Rudy Handoko, Faizal Ahmad, Florence Juanita Renti, "*Kewirausahaan Sosial Fondasi, Ragam, dan Transformasi*" (Jakarta: Prastiya Mulya Publishing, 2022), hal. 4

memberi peluang terhadap pemuda dengan mengajak mereka untuk berdiskusi dalam membuat program wirausaha sosial. Cara ini diambil dari konsep FGD (*Focus Group Discussion*), FGD merupakan bentuk diskusi yang dibuat untuk memunculkan informasi tentang keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki pemuda atau objek binaan.⁸

Sebagai salah satu konsep, FGD merupakan interaksi individu yang dipandu oleh moderator (seorang pemandu) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan pengalaman tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti dan dicermati.⁹ FGD bisa disebut sebuah proses pemberian informasi dan sekaligus pembelajaran. Bukan hanya bagi peserta, tetapi untuk para penelitiannya. membuka hati dan pikiran atas masukan-masukan baru, akan selalu berguna bagi proses pematangan penelitian atau program yang akan dilaksanakan.¹⁰ Berbeda dengan wawancara, dalam diskusi fasilitator tidak selalu bertanya. Tugas fasilitator bukan untuk bertanya, namun mengemukakan suatu persoalan, suatu kasus, suatu peristiwa, dan kejadian sebagai bahan diskusi.¹¹

Dalam proses pendampingan, penulis menggunakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat, yaitu *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini lebih dikenal sebagai aktivitas riset yang

⁸ Astridya Paramita, Lusi Ktistiana “ *Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif*”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 16, No 2 (April 2013). hal 118

⁹ Sri Handini, Sukesi, Hartati Kanty Astuti “*pemberdayaan masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir* “ (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 85

¹⁰ Irwanto “*Focused Group Discussion (FGD)*” (Jakarta” Yayasan Pustaka Obor Indonesia. April, 2006). hal 13-14

¹¹ Irwanto “*Focused Group Discussion (FGD)*”(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, April, 2006). hal 2

aktif dan dilakukan secara partisipan. PAR merupakan penelitian sebagai metode pemberdayaan yang memiliki keunggulan di mana prosesnya selalu diawali dengan merencanakan, melakukan tindakan atau aksi, untuk melakukan suatu kegiatan atau program yang dibuat.¹² Proses ini biasa dilakukan dengan melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah atau menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi.¹³

Kewirausahaan sosial merupakan kewirausahaan yang altruistik dan berfokus pada pengaruh perubahan sosial positif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk masyarakat.¹⁴ Kewirausahaan sosial dapat diartikan juga sebagai gagasan yang bersifat untuk mewujudkan perubahan dalam menciptakan kemandirian pada masyarakat khususnya para pemuda serta meningkatkan taraf hidup terhadap kualitas diri dan kualitas sosial mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan kegiatan kewirausahaan sosial melalui bisnis angkringan yang dilakukan oleh pemuda, agar dapat mewujudkan dan meningkatkan potensi para pemuda. Melihat saat ini bisnis angkringan sudah dikenal luas oleh masyarakat, namun untuk di Jakarta Utara sendiri hanya beberapa angkringan saja. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu adanya penelitian mendalam, yang penulis angkat dalam judul skripsi: "PENDAMPINGAN PEMUDA BIDARA MELALUI BISNIS

¹² Novena Ade Fredyarini Soedjiwo "Implementasi Mata Kuliah PAR (Participatory Action Researt) di TPQ Al-Magfiroh Denpasar Bali", *jurnal Stai Denpasar Bali*. Hal 2

¹³ Abdul Rahmat, Mira Mirnawati "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaab Masyarakat", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol 6, No 1 (Januari 2020). hal 64

¹⁴ Andi Mursidi, Dina Anika Marhayani, Zulfahita, Heru Susanto, Rini Setyowati, Rika Wahyuni "Kewirausahaan Sosial" (Jateng : Lakeisha) Cetak Pertama, Mei 2020. hal 6

ANGKRINGAN (*Partisipatory Action Research* (PAR) Kewirausahaan Sosial Pemuda di Kampung Bidara Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara).”

B. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengenalkan bisnis angkringan
2. Untuk membuka serta menjalankan bisnis angkringan.

C. Keluaran

Adapun keluaran yang dihasilkan dari kegiatan pendampingan peningkatan kewirausahaan sosial pemuda melalui bisnis angkringan yaitu:

1. Mampu mengetahui bisnis angkringan
2. Terwujudnya bisnis angkringan di Kampung Bidara sehingga para pemuda binaan mampu mengoprasikan angkringan

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pendamping ini seperti dijelaskan didalam **Tabel 1.1** berikut ini:

Tabel 1.1 *Logical Framework* Kegiatan Pendampingan

Tujuan	Output	Aktivitas (peroutput)	Indikator	Asumsi Penting	Waktu
Meningkatkan kemampuan pemuda dalam berbisnis	Memahami UMKM dalam berbisnis	Kegiatan praktik berbisnis	Jumlah peserta	Keaktifan dan pemahaman peserta	Januari Desember 2023

Meningkatkan kemandirian pemuda dalam pengelolaan angkringan	Dapat mengelolah bisnis sendiri	Kegiatan praktik berbisnis	Jumlah peserta	Keaktifan dan pemahaman peserta	Januari Desember 2023
--	---------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------

E. Potensi dan Permasalahan

Setelah observasi selama 3 hari pada tanggal 8-10 juni 2022, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh pemuda di kampung Bidara antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Dari observasi yang dilakukan ditemukan beberapa masalah terkait bidang pendidikan yang ada di kampung Bidara di antaranya masih banyak pemuda yang hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dan kurangnya pemahaman tentang berbisnis, selain itu juga belum ada fasilitas atau ruang untuk wadah bagi mereka. Karena keterbatasan ekonomi keluarga masih banyak pemuda yang bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Bidang Lingkungan

Permasalahan utama pada bidang lingkungan yang terjadi di kampung Bidara ini yaitu, sulit membuat lingkungan yang lepas dari pergaulan bebas, selain itu ketidakmaksimalan pemanfaatan lahan yang ada, dapat digunakan dalam mengedukasi pemuda dalam hal berbisnis.

3. Bidang Sosial dan Budaya

Keramahan dan kerukunan merupakan suatu kebiasaan pemuda dalam menyambut tamu (teman dari kelompok lain) dan

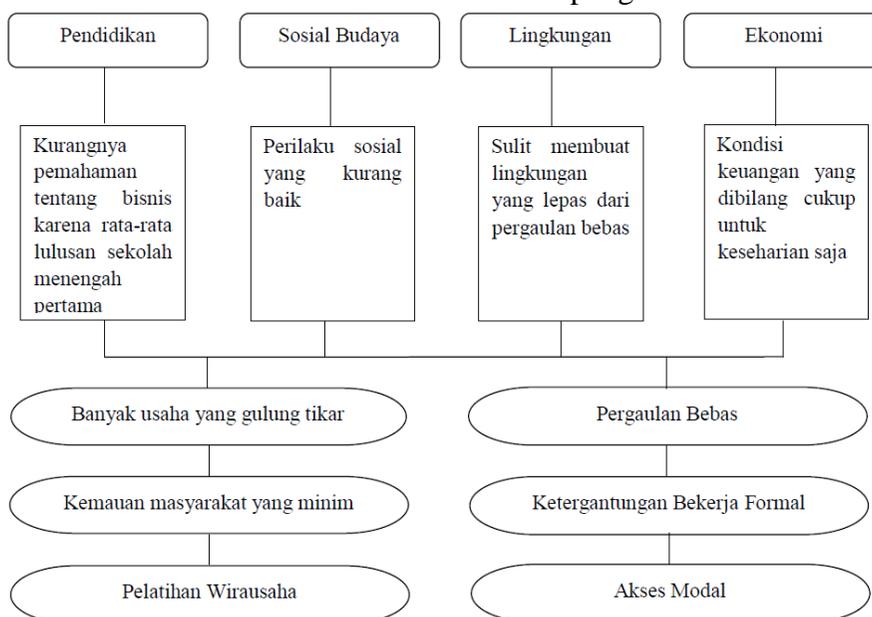
hormat terhadap yang lebih tua, pasti disambut dan dijamu dengan sangat baik, namun sayangnya penyambutannya itu bukan dengan hal-hal yang positif namun dengan hal yang sebaliknya, maka dari itu penulis mengajak pemuda untuk memanfaatkan potensi penyambutan tamu (dari kelompok lain) dengan menyambut pelanggan (*customer*), bisa dibilang belajar memahami pemasaran dan penjualan.

4. Bidang Ekonomi

Dalam hal ini menjadi faktor penting dalam pemberdayaan pada pemuda, karena dilihat dari segi ekonomi setiap keluarga memanglah cukup memprihatinkan, namun dapat dikatakan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dari sinilah penulis memberikan peluang kepada pemuda agar mampu dalam membuka usaha atau bisnis bagi setiap individunya.

Bagan 1.1

Pohon Masalah Kampung Bidara



F. Fokus Pendampingan

Adapun fokus pendampingan kewirausahaan pemuda melalui bisnis angkringan di kampung Bidara seperti yang dipaparkan dalam **Tabel. 1.2** berikut:

Tabel 1.2 Pendampingan Pemuda

NO	Program dan Registan	Tujuan	Keluaran (<i>Output</i>)	Dampat (<i>Outcome</i>)
1.	<p>Kumpul Manfaat Meningkatkan Literasi Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdiskusi dengan pemuda - Pendampingan praktik usaha mikro - Pendampingan mental pemuda dalam kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka wawasan dalam kewirausahaan - Mengetahui praktik usaha mikro - Membentuk mental pemuda dalam kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan mengakses keuangan - Mampu mengelola asset - Kemampuan mata pencarian berkelanjutan - Kemampuan mengelola modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan pribadi - Meningkatkan pendapatan keluarga - Memunculkan kesadaran akan diri sendiri - Pemuda terdorong untuk menjadi lebih mandiri

G. Metode dan Teknik

Pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat ini menggunakan metode *top-down* (dari atas ke bawah) dan *bottom-up* (dari bawah ke atas). Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* memberikan warna dalam berbagai proses pembangunan, baik dalam konteks *community development*, pemberdayaan masyarakat, manajemen

publik, bahkan hingga penganggaran.¹⁵ *Top down* merupakan perencanaan di mana para petinggi sebagai pemberi arahan, dan masyarakat harus mengikuti arahan tanpa harus mendengarkan pendapat masyarakat.¹⁶ Sedangkan *bottom up* merupakan satu perspektif pembangunan yang menjadikan ataupun memposisikan masyarakat sebagai subjek, atau dalam artian segala aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat, dapat diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta dapat memberdayakannya.¹⁷ Pendekatan *top-down* menghindari ‘kekacauan’ dalam menyerahkan otonomi penuh pada komunitas namun mengharapkan kesempatan sepenuhnya untuk memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan lokal, serta menciptakan masyarakat yang diberdayakan, tangguh dan berkelanjutan. Sementara itu pendekatan *bottom-up* memiliki keunggulan (*advantage*) untuk memanfaatkan pengetahuan atau pemahaman lokal secara maksimal, dan memanfaatkan keterampilan lebih baik. Dengan tujuan proses *top-down* untuk memastikan informasi konseptual yang benar dapat disimpan, sedangkan *bottom-up* untuk memastikan bahwa informasi, terutama yang berawal dari lapangan tidak hilang.

Dari pendekatan yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi. Newman dan Logan mengemukakan empat unsur strategi di setiap usaha di antaranya :

¹⁵ Falih Suaedi, Genut Wahyu Widiono “Integrasi Pendekatan Top=Down dan Bottom-Up dalam Community Development (Studi Pada Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kampung Down Syndrome di Kabupaten Ponorogo),” Jurnal Untag. Vol 1, No 1 (1017). hal 618

¹⁶ Hikmawati Fajri Devi Safitri, Tjut Afiedan Syahara “Model Komunikasi Top-Down dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Borobudur Communication Review, Vol 1, No 1 (2021). hal 15

¹⁷ Ibid. hal. 15

1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualitas hasil (*out put*) serta sasaran (*target*) yang harus dicapai dan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat.
2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (*basic way*) yang paling efektif untuk mencapai tujuan.
3. Mempertimbangkan dan menetapkan Langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan tujuan sasaran (*goals*).
4. Mempertimbangkan, menetapkan tolak ukur, dan patokan ukuran *standard* dalam mengukur serta menilai taraf keberhasilan usaha.

Metode pelaksanaan kegiatan kewirausahaan sosial ini dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan pendampingan, dalam pendekatan ini digunakan untuk memudahkan proses pemberdayaan masyarakat. *Participatory Action Research* adalah salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan mekanisme penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, ialah adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya pemimpin daerah dalam masyarakat dan adanya kebiasaan baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan.¹⁸

PAR adalah metode pemberdayaan yang melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam tindakan sebagai solusi atas masalah

¹⁸ Abdul Rahmad, Mira Mirnawati “*Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 6, No.1 (Januari 2020), hal. 64

yang telah terdefinisi.¹⁹ Proses kewirausahaan pemuda ini melalui *Profit For Benefit Social Enterprise*, bisnis sosial dengan laba untuk kemaslahatan memiliki tiga poin sasaran atau target yaitu kelancaran, pembangunan, dan pertumbuhan. Dengan prinsip ini pembisnis diharapkan sepenuhnya mandiri tanpa memiliki ketergantungan terhadap seseorang atau sebuah lembaga donatur pada umumnya bisnis sosial ini terbilang besar.²⁰ *Profit For Benefit Social Enterprise*, juga memfokuskan pertumbuhan skala atau unit bisnisnya berkembang (*growth*). Sifatnya sepenuhnya mandiri dan menghilangkan ketergantungan terhadap individu atau lembaga penyalur dana, dengan kata lain objek binaan menjadi mandiri dalam berbisnis.

Kewirausahaan sosial tidak lepas dari kewirausahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu untuk mengetahui komponen-komponen mengenai kewirausahaan yang sampai saat ini terus dikembangkan oleh para ahli. Di antaranya kewirausahaan sosial terdiri dari empat komponen utama antara lain:

- a. *Social Value*: Nilai yang menitik beratkan penciptaan kemanfaatan secara sosial. Titik berat pada nilai ini adalah pada masalah lingkungan, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
- b. *Civil Spciety*: Berdasarkan nilai ini kewirausahaan sosial memerlukan peran masyarakat luar untuk mengoptimalkan modal sosial yang sudah ada.
- c. *Inovation*: Komponen inovasi tak akan bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Inovasi ini terdiri dari bermacam-macam di

¹⁹ Ibid. hal 64

²⁰ Achmad Suryana. “*Pengembangan Kewirausahaan untuk UKM Daerah*” Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, Hal. 18

antaranya inovasi pada model bisnis, inovasi pada produksi, pemasaran serta inovasi pada usaha penyelesaian permasalahan yang ada.

- d. *Economic Activity*: Implementasi kewirausahaan sosial diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan bisnis dengan kegiatan sosial.²¹

Bill Drayton (pendiri *Ashoka Foundation*) selaku penggagas kewirausahaan sosial menjelaskan bahwa ada dua kunci kewirausahaan sosial, antara lain:

1. Adanya inovasi yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat, dalam artian mengubah habit negatif dengan mengarahkan kepada sesuatu yang positif.
2. Hadirnya perseorangan yang kreatif, bervisi, berjiwa wirausaha (*entrepreneurial*) dan beretika.²² dengan kata lain seseorang yang mampu mendobrak serta mendorong masyarakat khususnya pemuda agar lebih memfokuskan pada potensi berbisnis yang mereka miliki.

Dilihat dari betapa berpengaruhnya dalam meraih sebuah tujuan yang diinginkan, maka perlu strategi yang mendalam dalam meraih tujuan.²³ Strategi kewirausahaan (*entrepreneurial strategy*) mempresentasikan sejumlah keputusan, tindakan, dan reaksi yang pertama-tama menghasilkan dan kemudian mengeksploitasi, sebuah usaha baru dengan cara memaksimalkan manfaat dari hal-hal baru serta

²¹ Andi Mursidi, dkk., (ed.) *Kewirausahaan Sosial* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020), h. 7

²² Acmad Suryana “*Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UMK Daerah*” (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018), hal. 19

²³ Andi Mursidi, dkk., (ed.) *Kewirausahaan Sosial* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020), hal. 595

meminimalkan biayanya.²⁴ Strategi kewirausahaan memiliki tiga tahapan utama yaitu:

- a. Menciptakan kesempatan dalam sebuah usaha baru.
- b. Mengeksploitasi sebuah usaha baru.
- c. Umpan balik dari menciptakan dan mengeksploitasi.²⁵

Kewirausahaan merupakan penerapan dalam menciptakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi. Kewirausahaan pada dasarnya merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seorang yang mempunyai kemauan keras dalam mewujudkan gagasan dan inovasi kedalam dunia usaha yang nyata dan dapat dikembangkan.

Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto dalam Dede & Ruth bahwasanya dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 7 tahapan yang dilakukan antara lain:

1) Tahapan persiapan “*engagement*”

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dilakukan yaitu pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat atau fasilitator yang biasanya dilakukan oleh *community worker* dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan tenaga pemberdayaan masyarakat atau fasilitator sangat penting agar efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat terlaksanakan dengan baik, serta melakukan sosialisasi terhadap objek binaan.

²⁴ Robert D, Hisrich Michael P, Peters Dean A, Shepherd “*Entrepreneurship Kewirausahaan*” (Penerbit Salemba Empat), hal. 595

²⁵ Ibid, hal. 595

2) Tahap Pengkajian “*assessment*”

Tahapan ini merupakan proses pengkajian, yang dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Maka dari itu petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan sumber daya yang dimiliki. Dengan ini program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat mengikuti pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting agar efisiensi program dan kegiatan dapat terwujud dengan maksud, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu dan mana yang ditangguhkan.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program Kegiatan

Pada tahapan ini fasilitator bertugas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif mencoba mengikutsertakan warga dalam menyalurkan aspirasinya, dan memberikan usulan-usulan untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan memiliki beberapa cara alternatif untuk program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif ini harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan, sehingga alternatif yang dipilih dapat menunjukkan program yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan program pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Formalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing individu serta kelompok untuk menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Setelah mengetahui masalah yang kelompok sasaran hadapi dari

tahap sebelumnya, untuk menyelesaikannya dibutuhkan rencana-rencana matang agar dapat diselesaikan dengan segera. Di samping itu petugas membantu menyusun gagasan mereka kedalam bentuk tertulis terutama bila berkaitan dengan pembuatan proposal kepada donatur, dengan demikian donatur akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

5) Tahap “Implementasi” Program Kegiatan

Dalam program ini peranan masyarakat sebagai kader sangat diharapkan untuk menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan dengan kesepakatan. Adapun kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan yaitu terkait jam kerja, hari kerja dan tugas yang harus dikerjakan di lapangan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting, didalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini agar seluruh peserta dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sarannya, maka program ini perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak ada kendala.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dan pengevaluasian dari warga dan petugas program yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga diharapkan jangka waktu pendek terbentuk sistem komunitas untuk pengawasan internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap ini diharapkan dapat mengetahui jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai,

sehingga diketahui kendala-kendala pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

Selain pengawasan dan pengevaluasian, di sini juga terdapat pertanggungjawaban yang dilakukan oleh fasilitator. Bentuk pertanggungjawabannya adalah melaporkan progres untuk program yang sudah dilakukan diantaranya adalah pendanaan program, dokumentasi berupa foto-foto kegiatan, dan memberikan informasi secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman antara dua belah pihak (fasilitator dan objek binaan).

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi adalah tahapan pemutus hubungan secara formal dengan objek binaan yang menjadi sasaran program. Ditahap ini diharapkan proyek yang harus segera berhenti. Artinya masyarakat telah mampu mengatur dirinya untuk hidup lebih baik dengan mengubah situasi dan kondisi sebelumnya yang kurang menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.²⁶

Setelah diakhiri program ini tentunya baik fasilitator dan objek binaan mendapatkan dampak dan juga manfaat yang diperoleh. Dengan harapan dampak yang diperoleh positif. Dampak positifnya yaitu objek binaan yang dipekerjakan menjadi berdaya, mereka mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan. Otomatis dengan dampak tersebut dapat mengurangi angka pengangguran yang ada, akan tetapi dampak negatifpun dibutuhkan sebab dapat menjadikan objek binaan menjadi semakin kuat untuk dapat mandiri

²⁶ Maryani, D, dan Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan masyarakat. Deepublish. h. 13-14

menjalankan program yang telah berakhir hubungannya dengan fasilitator.

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah dakwah dalam artian mengajak kepada yang ma'ruf dan nahi mungkar. Menurut Ibnu Manzbur, ma'ruf adalah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa dimana dapat membuat hati manusia menjadi tentram. Sedangkan mungkar adalah lawan dari ma'ruf adalah kedurhakaan, sedangkan perbuatan mungkar adalah perbuatan yang menyuruh pada kedurhakaan²⁷.

Dengan demikian terwujudnya masyarakat yang beradab, beretika, *baldatun thayyibah warobbun ghafur*. Masyarakat yang didalamnya saling tolong menolong dan berakhlakul karimah yang mengakui keberadaan Allah sebagai Yang Maha Pencipta alam semesta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka disusun sistematik penulisan sesuai dengan format penulisan yang sudah ditentukan antara lain meliputi:

BAB I Pendahuluan yang berisi uraian atau memaparkan mengenai: 1) Latar Belakang Masalah, 2) Tujuan, 3) Keluaran, 4) Ruang Lingkup, 5) Potensi dan Permasalahan, 6) Fokus Pendampingan, 7) Metode dan Teknik, 8) Sistematik Penulisan.

BAB II. Deskripsi subjek dampingan yang menjelaskan secara detail dan terperinci data yang berisi informasi lokasi/subjek/objek

²⁷ Efri Syamsul Bahri. "Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan." (Jawa Timur: FAM Publishing. Maret 2019). hal. 14

dampungan, antara lain: sejarah komunitas, dampungan, kondisi geografis dan demografis, kondisi pendidikan dan budaya, kondisi ekonomi dan mata pencarian, serta kondisi sosial dan keagamaan komunitas dampungan. BAB III. Pelaksanaan program pendampungan yang menjelaskan detail pelaksanaan program kegiatan melalui *Participatory Action Reaserch* (PAR) yang menjadi perhatian dari tujuan dan permasalahan.

BAB IV. Pembahasan yang menjelaskan deskripsi dan Eksplanasi dan informasi yang fokus pada pelaksanaan program, mimik dari perubahan sosial sebelum pelaksanaan program dan setelah pelaksanaan program, serta analisis hasil program (hal baru dalam pengetahuan masyarakat).

BAB V. Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran yang implementasikan secara terpisah.

